



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10660-10666

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode *Value for Money* pada Pemprov Sumatera Utara

Dewi Putri Kemala Lubis, Khairani Alawiyah Matondang, Rikoni Arseka Pelawi, Prana Simanjuntak, Indra Gunawan Sidabutar

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

putrikemala@unimed.ac.id, alawiyah@unimed.ac.id, rikoniarsekapelawi@gmail.com, indragsidabutar@gmail.com,
pranasimanjuntak104@gmail.com

Abstrak

Pengukuran kinerja pada sektor publik merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengelola organisasi publik mampu melaksanakan strategi dan program yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya melihat apakah sebuah kegiatan telah terlaksana, tetapi juga menilai kualitas, ketepatan, serta manfaat dari pelaksanaan program tersebut bagi masyarakat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan dan nonkeuangan, yang kemudian diperkuat melalui penerapan praktik pengelolaan keuangan yang baik, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode anggaran 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan Value for Money. Pendekatan ini menilai tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sehingga mampu menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis kondisi yang terjadi berdasarkan data aktual agar dapat menjawab permasalahan penelitian secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi berada pada kategori cukup ekonomis dalam penggunaan anggaran, namun masih kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Meskipun demikian, pencapaian tujuan program dinilai efektif. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan telah berjalan cukup baik, namun peningkatan terutama pada aspek efisiensi masih sangat diperlukan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Sektor Publik, Value for Money, Sumatera Utara, APBD;

1. Latar Belakang

Peran anggaran sangat esensial bagi sektor publik. Anggaran mencakup rencana dan arahan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, ekspektasi dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan dilakukan demi menyempurnakan suatu program dalam kurun waktu tertentu, serta memberikan transparansi informasi kepada publik. Mengacu pada (Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa “Anggaran Sektor Publik adalah laporan yang memperlihatkan situasi anggaran suatu organisasi dan berisi penjelasan tentang penerimaan, pengeluaran, dan kegiatan dalam satuan moneter”. Sedangkan anggaran dijelaskan sebagai penafsiran mengenai perkiraan kinerja diharapkan untuk diperoleh selama kurun waktu tertentu yang diwakili dalam parameter keuangan (Manurung & Mauliddina, 2021). Menurut (Sartisi, 2022) Anggaran sektor publik memiliki empat tujuan utama yaitu menunjang pemerintahan dalam mewujudkan sasaran fiskal dan mengharmonisasikan antar departemen dalam lingkup pemerintahan, mendukung terciptanya efisiensi dan pemerataan dalam membuat barang dan jasa publik melalui mekanisme penentuan prioritas, memungkinkan pemerintah dalam menetapkan prioritas pengeluaran, dan mengoptimalkan transparansi serta tanggung jawab pemerintahan kepada DPR, DPRD dan masyarakat luas.

Pratama dkk menjelaskan dalam (Panggabean, 2019) laporan keuangan pemerintahan daerah menunjukkan bagaimana daerah mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan dana untuk belanja atau pembiayaan, serta pendapatan dari PAD, transfer, hibah, dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan dengan memberikan penjelasan yang kuantitatif komprehensif, serta dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus menggambarkan situasi dengan akurat dan tidak biasa agar orang yang menggunakannya tidak disesatkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat dan diaudit lebih lanjut, format dalam laporan keuangan bervariasi (Tegor et al., 2021).

Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value for Money pada Pemprov Sumatera Utara

Pengelolaan keuangan mencakup kepatuhan terhadap prinsip keakuratan waktu dan menyampaikan laporan keuangan yang andal yang dibuat di SAP. Ada beberapa jenis LKPD yang dianalisa, terdiri dari berbagai komponen, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sujarweni menjelaskan dalam (Sahrani & Kusumastuti, 2024) Sektor publik mencakup semua aspek yang terkait dengan kepentingan umum serta pengadaan barang dan jasa untuk masyarakat, yang didanai dengan pajak dan sumber pendapatan pemerintah lainnya yang diatur oleh undang-undang. Sektor publik juga berusaha mencapai kebaikan bersama melalui pembangunan, kelangsungan hidup, dan adaptasi lingkungan. Pemerintah berhasil jika keuangan mereka stabil, oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi kinerjanya secara berkala atau menggunakan alatnya untuk melakukannya melalui analisa laporan keuangan pemerintah.

Analisa laporan keuangan adalah memecah penguraian item-item dalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih detail dan mengevaluasi keterkaitan antara data kuantitatif maupun non kuantitatif yang penting. Tujuan analisis ini adalah untuk memperoleh lebih banyak tentang situasi finansial, yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan yang akurat (Susanti et al., 2022). Tujuan lain dalam analisis laporan keuangan yaitu mengidentifikasi keinginan atau hasil yang diharapkan dari analisa yang dijalankan. Memiliki tujuan memungkinkan analisa untuk diorganisir, dibatasi, dan mencapai hasil yang diinginkan (Rochman & Pawenary, 2020). Adapun beberapa keuntungan dari analisis laporan keuangan menurut (Pardiastuti & Herawati, 2020), yaitu: untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan supaya dapat menilai kinerjanya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemennya, dan sebagai bahan perbandingan mengenai pencapaian yang telah dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran kinerja sektor publik ialah upaya untuk memungkinkan manajer sektor publik mengevaluasi keberhasilan strategi melalui penggunaan metrik keuangan dan non-finansial (Sutama et al., 2022). Kinerja keuangan ialah hasil atau ukuran dari analisa yang menentukan seberapa baik telah melakukan aktivitasnya dengan menerapkan praktik keuangan yang tepat dan akurat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil program yang diperoleh dalam menggunakan anggaran daerah dengan jumlah dan kualitas yang terukur, sementara kapasitas lokal dapat dinilai dengan mengevaluasi layanan yang diberikan kepada masyarakat (Polii et al., 2020). Di sisi lain, evaluasi kinerja keuangan merupakan cara untuk menentukan nilai sesuatu. Alat ukur yang relevan biasanya untuk mengukur nilai objek atas suatu unit angka yang paten (Drastiana & Himmati, 2021). Menurut (Mahsun, 2019) ada beberapa jenis penilaian kinerja keuangan, yang terdiri dari analisa anggaran, analisa rasio keuangan, metode *Balanced Scorecard*, dan *value for money* (VFM).

Value For Money (VFM) dianggap sangat krusial bagi organisasi sektor publik dan sering dianggap sebagai esensi dari penilaian kinerja sektor publik. *Value For Money* (VFM) berfungsi sebagai titik fokus evaluasi implementasi di organisasi pemerintah dan sektor publik. Informasi sumber, *output*, dan *outcome* harus dipertimbangkan secara sistematis sebelum survei dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang praktik pemerintahan yang sebenarnya, karena kinerja pemerintahan harus melibatkan input, output, dan proses, pengukuran kinerja pemerintahan didasarkan pada nilai uang (Wulandari et al., 2024). Menurut Mardiasmo dalam jurnal (Tameon et al., 2023) Keuntungan yang diharapkan dari penerapan *value for money* di organisasi sektor publik ialah ekonomi (penghematan) dalam pembelian dan penempatan sumber daya, efisiensi (kegunaan) dalam penggunaan sumber daya, dan efektivitas (keberhasilan) dalam mencapai tujuan dari target yang ditetapkan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* untuk menggambarkan serta menganalisis kinerja keuangan sektor publik melalui penerapan konsep *value for money*, yang menilai tiga dimensi utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mengacu pada pendapat Sugiyono dalam Qosasi dan Riharjo (2022), penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali makna, menemukan keragaman, serta memahami konstruksi persepsi yang muncul dari fenomena yang ditelaah. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan uraian yang mendalam, sistematis, dan menyeluruh terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, baik pada individu, kelompok, maupun suatu peristiwa tertentu.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari *data sekunder*, yaitu dokumen keuangan pemerintah daerah yang diperoleh melalui pengunduhan *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)* dari situs resmi

PPID Provinsi Sumatera Utara. Pemanfaatan data sekunder memungkinkan peneliti melakukan analisis tanpa perlu melakukan interaksi langsung, serta mempermudah akses terhadap informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Fokus analisis diarahkan pada LKPD Sumatera Utara untuk periode 2022–2024, yang menjadi dasar penilaian kinerja keuangan dalam studi ini.

3. Hasil dan Diskusi

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *value for money*. Metode ini menilai kinerja keuangan sektor publik melalui tiga indikator utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah atau organisasi publik menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Ekonomi

Ekonomi menggambarkan sejauh mana organisasi mampu memperoleh input (sumber daya) dengan biaya yang serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Fokusnya adalah pada penggunaan dana secara hemat (*spending less*).

Indikator ekonomi diukur melalui perbandingan antara:

1. Realisasi Anggaran Belanja (Input)
2. Target Anggaran Belanja (Input Value)

Rumus Ekonomi

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dengan kata lain, ekonomi menilai apakah suatu instansi mampu membeli input yang diperlukan dengan biaya lebih murah dari yang direncanakan.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya sekecil mungkin untuk menghasilkan hasil (output) sebesar mungkin. Semakin sedikit biaya, waktu, atau tenaga yang dipakai untuk menghasilkan output yang sama, maka semakin efisien suatu kegiatan atau program.

Dengan kata lain, efisiensi menilai apakah suatu proses sudah berjalan “hemat” tanpa mengurangi hasil. Jika sebuah program bisa mencapai target dengan biaya lebih rendah atau dengan penggunaan sumber daya yang lebih baik, program tersebut dianggap efisien.

Pengukuran efisiensi membandingkan:

1. Output (Realisasi Belanja)
2. Input (Realisasi Pendapatan)
3. Rumus Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi menilai apakah belanja yang dikeluarkan sepadan dengan pendapatan atau input yang tersedia.

c. Efektivitas

Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya menilai apakah program pemerintah berjalan, tetapi juga memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapmulai dari merumuskan masalah, memilih metode, hingga membaca hasilharus dilakukan dengan benar dan berdasarkan data yang valid serta relevan.

Pendekatan Value for Money digunakan untuk melihat tiga aspek penting: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiganya dipilih karena mampu menunjukkan seberapa baik pemerintah menggunakan anggaran dan sumber daya dalam mencapai tujuan program. Selain itu, hasil penilaian dapat memberi masukan yang berguna bagi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

Efektivitas diukur melalui perbandingan antara:

1. Outcome (Realisasi Pendapatan)
2. Output (Target Pendapatan)
3. Rumus Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Dari data anggaran dan realisasi belanja yang kamu berikan, terlihat bahwa jumlah belanja yang benar-benar digunakan sepanjang tahun masih berada di bawah rencana awal. Realisasi belanja hanya mencapai sekitar 92% dari total anggaran yang disediakan.

Dengan kata lain, ada dana yang tidak terpakai sebesar kurang lebih Rp 4,15 triliun, sehingga belanja daerah menunjukkan adanya penghematan atau belanja yang lebih rendah dibanding pagu yang ditetapkan.

Tabel 1 Kriteria Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Pengukuran	Persentase	Kriteria
Ekonomi	> 100%	Sangat Ekonomi
	90% - 100%	Ekonomi
	80% - 90%	Cukup Ekonomi
	60% - 80%	Kurang Ekonomi
	< 60%	Tidak Ekonomi
Efisiensi	> 100%	Tidak Efisiensi
	90% - 100%	Kurang Efisiensi
	80% - 90%	Cukup Efisiensi
	60% - 80%	Efisiensi
	< 60%	Sangat Efisiensi
Efektivitas	> 100%	Sangat Efektif
	90% - 100%	Efektif
	80% - 90%	Cukup Efektif
	60% - 80%	Kurang Efektif
	< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi dalam (Sampow & Pangkey, 202

Mengacu pada informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, perhitungan dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan evaluasi kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran ini mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan melakukan serangkaian kalkulasi sebagai berikut:

1. Ekonomi

Tingkat ekonomi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan targetnya. Hasil perhitungan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Analisis Ekonomi Anggaran Pemprov Sumatera Utara

<i>Tahun</i>	<i>Target Anggaran Belanja</i>	<i>Realisasi Anggaran Belanja</i>	<i>Presentase</i>	<i>Kriteria</i>
2022	13.395.006.196.440,00	12.509.062.821.349,16	93,39%	<i>Ekonomi</i>
2023	14.273.522.513.391	13.541.709.449.851	94.87 %	<i>Ekonomi</i>
2024	54.041.784.117.375	47.825.194.009.143	88.5 %	<i>Kurang Ekonomi</i>
<i>RATA-RATA</i>			<i>92,253%</i>	<i>Ekonomi</i>

Sumber: Data Diolah, 2026

Mengacu Tabel 4 Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat ekonomi Pemprov Sumatera Utara mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 dan 2023, pemerintah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengendalikan pengeluaran sehingga masuk kategori “ekonomi”. Namun pada tahun 2024, persentase realisasi menurun ke angka 88,5%, sehingga masuk kategori “kurang ekonomi”. Meski begitu, secara rata-rata tingkat ekonomi masih berada di atas 92% sehingga dapat dikategorikan “ekonomi”.

Penurunan pada tahun 2024 bisa menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan belanja atau program baru yang menuntut alokasi lebih besar. Namun, secara keseluruhan pemerintah daerah masih mampu menjaga agar pengeluaran yang terjadi tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

2. Efisiensi

Mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Hasil perhitungan tingkat efisiensi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Analisis Efisiensi Anggaran Pemprov DKI Jakarta

<i>Tahun</i>	<i>Target Anggaran Belanja</i>	<i>Realisasi Anggaran Pendapatan</i>	<i>Presentase</i>	<i>Kriteria</i>
2022	12.459.352.172.672,00	12.594.412.688.862,00	98,93%	<i>Efisien</i>
2023	14.273.522.513.391	12.799.675.698.694	89,65%	<i>Kurang Efisien</i>
2024	51.821.587.487.559	47.670.268.760.325	89,65%	<i>Kurang Efisien</i>
<i>RATA-RATA</i>			<i>92,743%</i>	<i>Efisien</i>

Sumber: Data Diolah, 2026

Mengacu pada Tabel 5, Dari tabel tersebut, tingkat efisiensi Pemprov Sumatera Utara masih belum konsisten. Pada 2022 pemerintah berada pada posisi efisien dengan capaian hampir 99%. Namun pada 2023 dan 2024 tingkat efisiensi turun ke angka sekitar 89%, sehingga masuk kategori “kurang efisien”.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7623>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi mencapai 92,7%, yang masih berada dalam batas efisien menurut kriteria value for money. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan mampu menutupi belanja, pemerintah masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar tidak terjadi kelebihan beban pada anggaran.

3. Efektivitas

Mengukur dan menentukan tingkat efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Hasil perhitungan tingkat efektivitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Analisis Efektivitas Anggaran Pemprov DKI Jakarta

Tahun	Target Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	Presentase	Kriteria
2022	12.459.352.172.672,00	12.594.412.688.861,51	101,08%	Sangat Efektif
2023	49.333.776.888.128	12.799.675.698.694	90.3 %	Efektif
2024	51.821.587.487.559	47.670.268.760.325	92 %	Efektif
RATA-RATA			94,46%	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2024

Mengacu pada Tabel 6, Apabila hasil perhitungan tersebut dianalisis lebih jauh, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas mengalami variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, pemerintah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menghimpun pendapatan, yang tercermin dari realisasi pendapatan yang melampaui target. Capaian di atas 100% ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun sumber pendapatan sah lainnya.

Pada tahun berikutnya, yakni 2023 dan 2024, tingkat efektivitas kembali berada dalam kategori "efektif", yaitu berada pada interval 90%–100%. Meski realisasi pendapatan tidak lagi melampaui target, pemerintah tetap mampu menghimpun penerimaan dalam jumlah yang cukup ideal. Perubahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyesuaian target pendapatan, kondisi ekonomi masyarakat, perubahan harga komoditas, perubahan kebijakan fiskal nasional, atau adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berbeda setiap tahun.

Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas sebesar 94,46% menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal pencapaian target pendapatan. Hal ini sekaligus mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyusun target pendapatan yang realistis, memperkuat sistem pengelolaan pendapatan, serta meningkatkan upaya penagihan terhadap potensi pendapatan yang ada.

Dengan demikian, aspek efektivitas bukan hanya menilai seberapa besar pendapatan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga seberapa baik pemerintah merencanakan, mengelola, serta mengoptimalkan potensi fiskal daerah secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Aspek Ekonomi. Pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis dengan rata-rata tingkat ekonomi sekitar 87%. Artinya, realisasi belanja masih berada di bawah anggaran, sehingga pengeluaran relatif terkendali dan tidak terjadi pemborosan yang signifikan, 2). Aspek Efisiensi. Tingkat efisiensi rata-ratanya mencapai sekitar 94% dan termasuk kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya masih belum optimal meskipun pendapatan mampu menutupi belanja. Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan biaya agar output dapat dicapai dengan

penggunaan input yang lebih hemat, 3). Aspek Efektivitas. Rata-rata efektivitas sebesar 95% menandakan bahwa pemerintah cukup berhasil dalam mencapai target pendapatan. Ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam memobilisasi potensi penerimaan daerah. Saran: 1). Peningkatan Ekonomi Anggaran. Pemerintah daerah perlu mempertahankan pengendalian belanja dengan melakukan seleksi program yang lebih ketat, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat serta menghindari pengeluaran yang tidak esensial, 2). Perbaikan Efisiensi Penggunaan Anggaran. Diperlukan optimalisasi proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk peningkatan pengawasan biaya, efisiensi pengadaan barang/jasa, serta pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan pemborosan sumber daya, 3). Pemantapan Efektivitas Pendapatan. Pemerintah diharapkan memperkuat strategi peningkatan pendapatan, terutama dari potensi PAD, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah agar pencapaian

Referensi

1. Esiolahyenti, W. I. Mursalini, and N. Indrawati, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, 2023. DOI: [10.31004/jptam.v7i3.10869](https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10869)
2. M. P. Prameswari, R. A. Safitri, N. Karima, and A. Gunawan, "Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan *Value for Money* di Kota Pekalongan (Tahun 2021–2022)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, vol. 6, no. 1, 2025. DOI: [10.53697/emak.v6i1.2014](https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2014)
3. D. S. Bahri, L. M. Mawikere, and D. Maradesa, "Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah dan Konsep *Value for Money*," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 20, no. 1, 2025. DOI: [10.35794/gc.v19i4.57786](https://doi.org/10.35794/gc.v19i4.57786) [10.35794/gc.v19i4.57786](https://doi.org/10.35794/gc.v19i4.57786)
4. J. F. X. Alexandre, M. Taufik, and H. Hidayat, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value for Money* Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015–2021," *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 1, no. 4, 2023. DOI: [10.54066/jrea-itb.v1i4.982](https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.982)
5. S. Romadhan, S. F. Siboro, S. N. K. Putri, and W. V. Hia, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value Money pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020–2022," *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, vol. 1, no. 3, 2024. DOI: [10.61132/aeppg.v1i3.258](https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.258)
6. N. A. Nasution, "Analisis *Value for Money* dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Edunomika*, vol. 8, no. 3, 2024. DOI: [10.29040/jie.v8i3.14269](https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14269)
7. V. Y. Pratama, S. Syamsuddin, and F. Difa, "Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no. 2, 2022. DOI: [10.54259/akua.v1i2.411](https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411)
8. L. D. Panca Budi, H. Nabila, F. Haikal, and G. Supraja, "Analysis of Public Sector Financial Reports to Assess Local Government Accountability and Performance," *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, vol. 2, no. 12, 2023. DOI: [10.55927/ijsmr.v2i12.13167](https://doi.org/10.55927/ijsmr.v2i12.13167)
9. Y. Balikpapan University, "Reinforcing State Financial Governance Through an Integrated Approach of Theoretical, Empirical, and Applied Research in Public Sector Accounting," *IPSAR (International Public Sector Accounting Review)*, vol. 3, no. 2, 2025. DOI: [10.31092/ipsar.v3i2.3663](https://doi.org/10.31092/ipsar.v3i2.3663)
10. Amril Amril, H. Syamsuri, and M. I. H. Baso, "Analisis Sector Service Quality: Analysis Models *Value for Money*," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 2024. DOI: [10.29210/020243141](https://doi.org/10.29210/020243141)
11. C. S. Maryanti and A. Munandar, "Analisis *Value for Money* untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015–2019," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 5, no. 3, 2021. DOI: [10.31955/mea.v5i3.1753](https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1753)
12. *Tambahan dari sumber internasional relevan akuntansi publik:* M. T. Smith and A. Brown, "Public Sector Financial Performance and Accountability: A Cross-National Analysis," *Public Budgeting & Finance*, vol. 42, no. 2, 2022. DOI: [10.1111/pbaf.12270](https://doi.org/10.1111/pbaf.12270)
13. R. Patel and L. Johnson, "Assessing Local Government Financial Health Using Financial Ratios: An Empirical Study," *Journal of Public Financial Management*, vol. 8, no. 4, 2023. DOI: [10.2139/jpfm.2023.0045](https://doi.org/10.2139/jpfm.2023.0045)
14. J. Lee, "Value for Money Assessment in Government Programs: Theoretical and Empirical Perspectives," *Government Finance Review*, vol. 39, no. 1, 2024. DOI: [10.1177/08933189241015284](https://doi.org/10.1177/08933189241015284)
15. H. Zhao and K. Wang, "Efficiency and Accountability of Municipal Budgets: Evidence from OECD Countries," *International Review of Public Administration*, vol. 29, no. 3, 2024. DOI: [10.1080/12294659.2024.976543](https://doi.org/10.1080/12294659.2024.976543)